

HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DENGAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

IRCHAM OGESTIAWAN
B200 080 089

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DENGAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

Yang ditulis oleh:

IRCHAM OGESTIAWAN

B 200 080 089

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diterima

Surakarta, September 2012

Pembimbing


(Drs. Suyatmin,M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL DENGAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

IRCHAM OGESTIAWAN

B 200 080 089

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan dana alokasi umum terhadap belanja modal, dan bagaimana hubungan belanja modal terhadap kualitas pembangunan manusia.

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diperoleh dan yang dapat digunakan dalam penelitian ini sejumlah 105 Laporan Realisasi APBD serta PDRB per Kapita dan indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM) dan Kualitas Pembangunan Manusia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi sederhana dan uji asumsi klasik.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia

A PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Hal ini merupakan berkat di satu sisi, namun disisi lain sekaligus merupakan beban yang pada saatnya nanti akan menuntut kesiapan daerah untuk dapat melaksanakannya. Apabila kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terealisasi, maka beberapa aspek harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemennya (Darumurti et.al. 2003).

Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan dapat menambah pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah (Sidik et al., 2002:54). Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani et. al., 2005).

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001).

Penelitian ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Cristy dan Adi (2009) menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi 0,002 dan t sebesar 3,23. Sedangkan untuk variabel belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM) dan untuk menguji apakah terdapat hubungan Belanja Modal (BM) daerah dengan peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia.

B LANDASAN TEORI

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Christy dan Adi, 2008).

Jenis DAU:

- a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi

b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota

Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006 dalam Christy dan Adi, 2008). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Putro, 2010).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit (Putro, 2010).

Kualitas Pembangunan Manusia

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut

telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang berorientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan manusia (Gevisioner, 2004).

Salah satu ukuran IPM adalah besarnya pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pendidikan (Kuncoro, 2004). Untuk meningkatkan IPM khususnya dalam bidang pendidikan, caranya dengan memberantas buta aksara. Hal ini akan menjadikan masyarakat menjadi melek aksara. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995:12).

Komponen-komponen IPM menurut (UNDP, 1995:12) adalah sebagai berikut:

1. Lamanya Hidup (Longevity)

Lamanya hidup (Angka Harapan Hidup) adalah kehidupan untuk bertahan lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) (e_0), angka e_0 yang disajikan pada laporan ini merupakan ekstrapolasi dari angka e_0 pada akhir tahun 1996 dan akhir tahun 1999 yang merupakan penyesuaian dari angka kematian bayi (infant mortality rate) dalam periode yang sama. Dalam publikasi ini, angka IMR untuk tingkat provinsi dihitung berdasarkan data yang diperoleh dalam

sensus penduduk tahun 1971, 1980, 1990 serta data gabungan dari SUPAS 1995 dan SUSENAS 1996. Perhitungan dilakukan secara tidak langsung berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya

2. Tingkat Pendidikan

Dalam perhitungan IPM, komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu: angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf adalah persentase dari pendidik usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Tabel 2.2 menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan, rata-rata lama sekolah (MYS) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$MYS = \text{tahun konversi} + \text{kelas tertinggi yang pernah diduduki} - 1$$

3. Standar Hidup

Standar hidup dalam perhitungan IPM, didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antardaerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Menghitung pengeluaran per kapita dari modul SUSENAS (=Y)
- b. Menaikkan nilai Y sebesar 20% (=Y), karena berbagai studi diperkirakan bahwa data dari SUSENAS cenderung lebih rendah dari 20%
- c. Menghitung nilai daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) untuk setiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relative

terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar

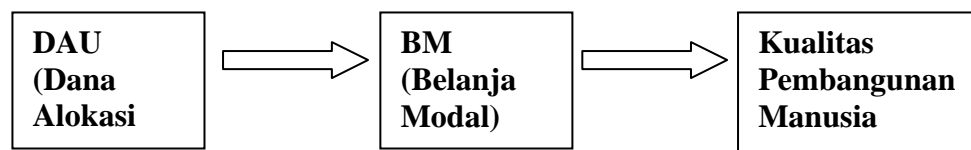
- d. Menghitung nilai *riil* Y1 dengan mendeflasikan Y1 dengan indeks harga konsumen (CPI) (=Y2)
- e. Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh rupiah yang sudah disetarakan antar daerah (=Y3)
- f. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli (=Y4). Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan

Hipotesis

H₁: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₂: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.

Kerangka Model



C METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dari tahun 2008-2010. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode sensus yaitu pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah sejumlah 35 kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara

menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan.

Dalam penelitian ini variabel yang diuji meliputi variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis	Variabel Independen	Variabel Dependen
1	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
2	Belanja Modal	KPM (Kualitas Pembangunan Manusia)

D HASIL PENELITIAN

Pengujian Hipotesis

Hasil t_{hitung} dengan menggunakan regresi sederhana menunjukkan nilai signifikansi yang sangat kecil yaitu sebesar 0,038, dengan nilai t sebesar 2,102. Model regresi ini memberikan fakta empirik bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal sehingga besaran DAU yang diterima pemerintah kabupaten/kota dapat di gunakan untuk mempredikasi besarnya belanja modal. Hal ini berarti hipotesis pertama yang dikembangkan yang menyatakan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal dinyatakan diterima.

Hasil t_{hitung} dengan menggunakan dengan menggunakan regresi sederhana menunjukkan nilai signifikansi yang sangat kecil yaitu sebesar 0,027, dengan nilai t sebesar (-2,253). Model regresi ini memberikan fakta empirik bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Hal ini berarti hipotesis kedua yang dikembangkan menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia dinyatakan diterima.

Pembahasan Hipotesis

Hasil analisis regresi sederhana pada uji hipotesis 1 memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,102 > 1,980$ dengan nilai signifikansi $0,038$ ($p < 0,05$). Artinya hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima, yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan transfer dana dari pemerintah pusat untuk Pemda.

Hasil analisis regresi sederhana pada uji hipotesis 2 memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,253 > 1,980$ dengan nilai signifikansi $0,027$ ($p < 0,05$). Artinya hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima, yang menyatakan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintahnya. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih dari pada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Sehingga pendidikan merupakan landasan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

E PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM). Hasil analisis regresi sederhana pada uji hipotesis 1 memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,102 > 1,980$ dengan $p < 0,05$, sehingga H_1 diterima. Artinya alokasi Belanja Modal (BM) dipengaruhi sumber penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU)

2. Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. Hasil analisis regresi sederhana hipotesis 2 memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,253 > 1,980$ dengan $p < 0,05$, sehingga H2 diterima. Artinya dengan bertambahnya Belanja Modal (BM) maka akan berdampak pada peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia.

Saran

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Tengah, sehingga akan memberikan hasil yang lebih mendekati kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi penelitian mendatang hendaknya periode penelitian lebih diperpanjang lagi, yaitu tidak hanya tiga tahun, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik.
3. Bagi penelitian mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi alokasi Belanja Modal Daerah, seperti Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, kebijakan pemerintah daerah, dan dana bagi hasil pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. BAPEKKI Depkeu.
- _____. 2004. *Human Development Report. United Nations Development Programme. New York. (www.cifor.cgiar.org)*.
- Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi IV. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. 2005. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pekalongan. Pekalongan.

- Bland, Robert I. And Samuel Nunn. 1992. *The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets*. Public Budgeting & Finance. Vol. 12, no. 2: 32-47.
- Cristy dan Adi, 2009, *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*, *The 3rd National Conference UKWMS*, Surabaya.
- Darumurti, Khrisna D.Umbu Rauta dan Daniel D. Kameo. 2003. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Dewi, adha. 2006. *Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. PPAMP YKPN. Yogyakarta.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1994. *Intertempora Analysis of State and Local Government Spending: Theory and Tests*. *Journal of Urban Economics* 35: 159-17.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat. (<http://www.datastatistik-indonesia.com>).
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi sektor publik*. Salemba empat. Jakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Propinsi Jawa Tengah dan DIY*. JAAI vol. 8 no. 2, 101-118.

Putro, Nugroho Suratno, 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Ramawati, Nur Indah, 2010, *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Saragih, Juli Panglima. 2005. *Desentralisasi fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sidik, Mahfud et al, 2002, *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Buku Kompas, Jakarta. (<http://www.balipost.co.id>).

Simanjuntak, Robert. 2001. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference*. LPEM-UI. Jakarta.

Syaiful. 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Syaukani, H.R, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesi*. Pustaka pelajar. Cetakan ke iv. Yogyakarta.

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset "Akuntansi Terapan"*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Undp. 1996. *Human Development Report*. Oxford University Press. New York.

World Bank. 2006. *World Development Report*.